

**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Dinyatakan Batal Demi  
Hukum (*Null And Void*) Oleh Mahkamah Agung Karena Hakim  
Pengadilan Tinggi (*Judex Factie*) Tidak Memuat Pertimbangan Hukum  
Tentang Hal – Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa  
Dalam Perkara Pemerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri No.1989  
K/Pid/1990).**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :**

**INDRI HAPSARI SETIAWAN**

**E1106028**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2010**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG DINYATAKAN  
BATAL DEMI HUKUM ( *NULL AND VOID* ) OLEH MAHKAMAH  
AGUNG KARENA HAKIM PENGADILAN NEGERI ( *JUDEX FACTIE* )  
TIDAK MEMUAT PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG HAL – HAL  
YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN TERDAKWA DALAM  
PERKARA PEMERASAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI  
NO.1989 K/Pid/1990).**

Disusun Oleh :

**INDRI HAPSARI SETIAWAN**

**E1106028**

Disetujui untuk Dipertahankan

Pembimbing

**BAMBANG SANTOSO, S.H., M.Hum**

**NIP. 196202091989031001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG DINYATAKAN  
BATAL DEMI HUKUM ( *NULL AND VOID* ) OLEH MAHKAMAH  
AGUNG KARENA HAKIM PENGADILAN NEGERI ( *JUDEX FACTIE* )  
TIDAK MEMUAT PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG HAL – HAL  
YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN TERDAKWA DALAM  
PERKARA PEMERASAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI  
NO.1989 K/Pid/1990).**

Disusun Oleh :

**INDRI HAPSARI SETIAWAN**

**E1106028**

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 05 Oktober 2010

**TIM PENGUJI**

1. Bambang Santoso, S.H.,M.H. : .....  
NIP. 196202091989031001
2. Edy Herdyanto, S.H., M.H. : .....  
NIP. 195706291985031002
3. Kristiyadi, S.H., M.H. : .....  
NIP. 195812251986011001

**MENGETAHUI**

Dekan

**(Muhammad Jamin, S.H., M.Hum.)**  
**NIP. 196109301986011001**

## PERNYATAAN

Nama : Indri Hapsari Setiawan

NIM : E 1106028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (*NULL AND VOID*) OLEH MAHKAMAH AGUNG KARENA HAKIM PENGADILAN NEGERI ( *JUDEX FACTIE* ) TIDAK MEMUAT PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG HAL – HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN TERDAKWA DALAM PERKARA PEMERASAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.1989 K/Pid/1990).** adalah betul–betul karya sendiri. Hal–hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 25 Mei 2010

Yang membuat pernyataan

Indri Hapsari Setiawan

E1106028

## HALAMAN MOTTO

*“Satu bukti lebih berarti daripada seribu janji”*

*(by Indri Hapsari)*

*“Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, menuju hidup, tetapi siapa  
mengejar kejahatan, menuju kematian”.*

*(by Indri Hapsari)*

*“Hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang  
tulus hati”.* *(by Indri Hapsari)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- AYAH BUNDA KU TERCINTA
- KAKAK – KAKAKKU DAN ADIKKU
- KEDUA KEPONAKANKU (JOVAN COLIN SETIAWAN DAN MAHAYOGI WAHYU DEWADATA) YANG LUCU - LUCU
- SAHABAT – SAHABATKU YANG SETIA DALAM SUKA DAN DUKA  
(EKA, NINDYA, DEWI,PUPUT, IKA, IRA , DIAN DAN PUTRI)  
SERTA TEMAN – TEMAN FAKULTAS HUKUM  
ANGKATAN 2006
- ALMAMATERKU

## KATA PENGANTAR

*Assalamu' alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (*Null And Void*) oleh Mahkamah Agung karena Hakim Pengadilan Negeri (*Judex Factie*) Tidak Memuat Pertimbangan Hukum Tentang Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa Dalam Perkara Pemerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1989 K/Pid/1990)”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus - tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan skripsi.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi dan atas segala nasehat serta wejangan - wejangannya agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan tidak lelah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat,

motivasi demi kemajuan Penulis, dan juga cerita - cerita serta pengalaman yang dapat memberikan semangat bagi Penulis. Semoga Bapak tetap menjadi orang yang bijak dan selalu humoris.

4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Hukum Acara Pidana yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis.
5. Bp Harjono, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Fakultas Hukum Non Reguler atas semua saran yang begitu berguna bagi kemajuan Penulis kedepan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat Penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.
7. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Sebelas Maret atas bantuannya yang memudahkan Penulis mencari bahan-bahan referensi untuk penulisan penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mugiono Setiawan. dan Ibunda Tri Sulisetyawati, yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan Penulis, baik materiil maupun spirituil. Tiada yang dapat menggantikan budi baik Ayahanda dan Ibunda, hanya ucapan terima kasih Penulis ucapkan. Semoga Ananda dapat mambahagiakan kalian dengan memenuhi harapan kalian.
9. Kakak-kakakku (K'Andreas dan K'Maharani), serta Adikku ( De' Bramantheo ), atas semua dukungan, kasih sayang, dan candaan yang hangat disaat Penulis galau. Semoga kalian menjadi kebanggaan keluarga.
10. Budhe Gino, dan Kak Indah atas nasihat, dukungan dan bantuannya kepada Penulis.
11. Mas Yoga dan keluarga, makasih atas dukungan, bantuan serta motivasi yang diberikan kepada Penulis.
12. Teman - temanku ( Eka mari kita berjuang sama-sama, Putri jangan pacaran mulu ayo cepet lulus, Nindya tetep jadi pribadi yang bijak ya, Puput aku salut dengan kedewasaanmu, Dewi pertahankan semangatmu ya, dan Ika tetep semangat dalam menulis skripsimu ya), makasih buat kalian yang setia mendengar curahan hati Penulis, memberikan masukan, nasihat serta



semangat dan juga kisah cerita tentang persahabatan kita, semoga tak lekang oleh ruang dan waktu. Thanks girls atas kebersamaan dalam persahabatan, yang membuat hidup Penulis lebih berwarna dan berarti.

13. Mas Hanggo, makasih atas nasihat, wejangan, dan juga dukungannya kepada Penulis hingga dapat dijadikan motivasi bagi Penulis untuk menuju kehidupan yang lebih baik.
14. Teman-temanku ( Ira, Adi, Galuh, Winwin, Susi, Dian, Faradita, Api, Wahyu, dll.....) dan seluruh teman-teman Angkatan 2006 FH UNS yang telah mengisi hari - hari Penulis selama ini dengan keanehan – keanehan serta keunikan pribadi kalian masing - masing hingga Penulis dalam hidup lebih berwarna dan berarti. Maaf tidak bisa menyebutkan kalian satu persatu.
15. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu Penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi Penulis maupun para pembaca.

Surakarta, 25 Mei 2010

Penulis

INDRI HAPSARI SETIAWAN

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
 <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
 <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>14</b>
<b>A. Kerangka Teori.....</b>	<b>14</b>
<b>1. Tinjauan Umum Tentang Hakim dan Kekuasaan</b>	
<b>Kehakiman.....</b>	<b>14</b>
a. Pengertian Hakim.....	14
b. Kedudukan Kekuasaan Hakim.....	14
c. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim.....	16
d. Wewenang Hakim.....	18

2. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	19
a. Pengertian Putusan Hakim .....	19
b. Jenis – jenis Putusan Hakim.....	21
c. Formalitas yang harus dipenuhi dalam Putusan Hakim	23
3. Tinjauan Umum Umum Tentang Asas <i>Nebis In Idem</i> .....	24
a. Pengertian dan Landasan Putusan Bebas.....	24
b. Macam – macam Putusan Bebas.....	25
c. Putusan Bebas ditinjau dari Asas Pembuktian.....	26
4. Tinjauan Umum tentang tindak pidana pemerasan.....	28
B. Kerangka Pemikiran.....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
<p>Pertimbangan yang menjadikan Mahkamah Agung membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara pemerasan karena alasan kelalaian Hakim Pengadilan Negeri (<i>judex factie</i>) tersebut tidak memuat mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam membuat putusan Hakim kaitannya dengan Pasal 197 KUHAP</p>	
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN .....</b>	

## ABSTRAK

**INDRI HAPSARI SETIAWAN, 2010. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (*NULL AND VOID*) OLEH MAHKAMAH AGUNG KARENA HAKIM PENGADILAN NEGERI (*JUDEX FACTIE*) TIDAK MEMUAT PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG HAL – HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN TERDAKWA DALAM PERKARA PEMERASAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1989 K/Pid/1990).** Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan yang dinyatakan batal demi hukum (*Null and Void*) karena Pengadilan Negeri (*Judex Factie*) tidak memuat pertimbangan hukum tentang hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara pemerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1989/K/Pid/1990).

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Jenis data sekunder yaitu data yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen - dokumen, buku - buku literatur, dan lain - lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, dari putusan Mahkamah Agung tersebut bahwasannya menurut pasal 197 KUHAP, ditentukan bahwa setiap putusan pemidanaan, Hakim PN (Pengadilan Negeri) dalam mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara pidana adalah wajib atau imperative memperhatikan formalitas yang harus dipenuhi dalam sebuah Putusan Hakim dalam hukum acara pidana ex: pasal 197 KUHAP, bilamana diabaikan maka putusan hakim tersebut adalah batal demi hukum. Dalam perkara ini Hakim Pengadilan Negeri (*judex factie*) dalam putusannya tidak memuat pasal 197 huruf “f” tentang keadaan mengenai hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa tersebut, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan Jaksa (Requisitoir) ex: pasal 197 ayat 1 huruf “e” KUHAP. Bilamana Hakim Pengadilan Negeri lalai memuat hal – hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa tersebut dalam putusannya, maka akibat hukumnya adalah putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut adalah menjadi batal demi hukum.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah tersebut tanpa ada pengecualian. Hal ini berarti bahwa negara hukum Indonesia sebagaimana digariskan adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Indonesia sebagai negara hukum harus berperan di segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan adanya keamanan, dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta agar supaya hukum ditegakkan artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum maupun oleh penguasa negara, segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.

Penegakan hukum itu sendiri adalah sebagai upaya untuk menegakkan norma hukum yang nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat mendorong kreatifitas serta peran aktif masyarakat dalam membangun suatu negara, khususnya dalam menjamin kemerdekaan Hak Asasi Manusia karena merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, dan bersifat universal. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang - orang yang berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. (Darwan Prinst, 1998: 1)

Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara. Dalam hal ini hukum di negara Indonesia dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing - masing.

Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga peradilan tersebut. Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan penting karena hakim dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Suatu putusan hakim mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan.

Kita dapat melihat proses penegakan hukum di Indonesia sangat berkaitan erat dengan proses pembangunan negara, karena pembangunan negara disamping dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negative terhadap masyarakat itu sendiri, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang akhir – akhir ini menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang sesuai, salah satunya

adalah tindak pidana pemerasan dalam kasus Wina Cottage antara Manager dan Satpam.

Wina Cottage, adalah Hotel yang terletak di Kuta, Bali dan dikelola oleh Manager I Wayan Winada yang membawahi sejumlah karyawan, termasuk beberapa orang Satpam (Security). Diantara Satpam ini, satu orang diantaranya bernama: Fernando. Sebagai anggota Satpam, Fernando termasuk orang yang bertemperamen keras. Ia sering bertengkar dengan para karyawan lain dan ringan tangan. Keributan di Wina Cottage sering terjadi sebagai akibat ulah Fernando ini. Bahkan ia sering mangkir dari tugasnya. Akhirnya ia dibebaskan tugasnya (dipecat). Karena tidak puas, maka Fernando dengan membawa senjata tajam menemui Manager dan stafnya untuk menuntut uang pesangon 12 bulan gaji penuh. Tuntutan ini ditolak oleh Bagian Personalia dan Keuangan. Fernando sering datang ke Hotel untuk menuntut tuntutannya dan tidak dipenuhi oleh Manager. Karena rasa takut dan khawatir atas nasibnya, maka Manager melalui karyawan dan sopirnya memerintahkan untuk memberi uang kepada Fernando sebesar Rp.500.000,- Semula itu ditolak oleh Fernando karena dianggapnya terlalu sedikit, tetapi akhirnya diterima juga. Pada hari berikutnya, Fernando mengancam melalui telepon meminta agar Manager memberi uang lagi dan akan diambil di Hotel. Fernando datang ke Hotel dan Manager memberi uang kepadanya Rp 2.000.000,- Pada hari lainnya, via telepon Fernando minta uang lagi dan Manager memberi uang lagi Rp. 1.500.000, Beberapa hari berikutnya, Fernando minta uang lagi dan oleh Manager diberi Rp. 1.000.000,- sehingga jumlah uang yang diterima Fernando dari Manager sebesar Rp. 5.000.000, . Pada minggu berikutnya, via telepon, Fernando minta uang lagi dengan ancaman akan membuat keributan di Hotel, bila permintaannya tidak dipenuhi oleh Manager. Manager Wina Cottage, akhirnya melaporkan ancaman Fernando tersebut kepada Kepolisian setempat, dan berhasil ditangkap serta disita beberapa senjata penikam dari tangan Fernando.

Selanjutnya Kejaksaan setelah menerima berkas perkara dari Kepolisian kemudian melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan melanggar Pasal 368 (1) jo 64 (1) K.U.H. Pidana

(Pemerassan) Pasal 335 (1) jo 64 (1) K.U.H. Pidana (Perbuatan tidak menyenangkan), Pasal 2 (1) dari U.U. No. 12/Drt/1951 (Senjata). Setelah persidangan Pengadilan dinyatakan selesai, maka Jaksa menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan delict dalam Pasal 368 (1) jo 64 (1) K.U.H.P, Pasal 2 (1) U.U. No. 12/Drt/1951. Karena itu agar Hakim memberikan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan karena melakukan delict pemerasan dan membawa senjata tanpa hak.

Terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diatas, maka terdakwa mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi. Hakim Banding, setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya berpendirian, bahwa pertimbangan dari Hakim Pertama tentang terbuktinya Tindak Pidana adalah sudah benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dari Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, oleh Hakim Pertama, perlu diperbaiki atau diubah, dan akhirnya Hakim Banding memberi putusan yang diktumnya adalah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar serta terdakwa Fernando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pindana pemerasan yang dilakukan berturut – turut serta berlanjut dengan membawa senjata tajam tanpa hak.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut diatas, pihak terdakwa mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan mengemukakan “Keberatan Kasasi” yang pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan Hakim Pertama, padahal Hakim Pertama salah menerapkan hukum ex Pasal 368 (1) K.U.H. Pidana, dimana unsur (*delict*) memaksa tidak terbukti selama dipersidangan. Pengadilan Tinggi juga dalam putusannya tidak mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa, sehingga tidak memenuhi Pasal 197 huruf “f” K.U.H.A.P. yaitu pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Majelis Mahkamah Agung yang ditugasi memeriksa kasasi perkara ini, dalam